

Nama Media: **BALI POST**

Kategori: **PASAR**

Revitalisasi Pasar Banyuasri

Februari 2019, Pembangunan Pasar Darurat Ditenderkan

Detail Engineering Design (DED) pembangunan pasar darurat untuk menampung pedagang Pasar Banyuasri, Singaraja sudah selesai disusun. Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Buleleng memastikan tender pembangunan pasar darurat itu akan dilakukan awal Februari 2019. Pemerintah berencana membangun 500 unit los, 56 kios, dan ruko 95 unit untuk pedagang yang potensial berjualan sekarang. Selain jumlah, ukuran los, kios, dan ruko di pasar darurat mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI).
Lalu, apakah parameter acuan penyusunan DED pasar darurat tersebut?

KEPALA Disdagprin Buleleng Ketut Suparto usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng Senin (28/1) kemarin, mengatakan, acuan dalam menyusun DED pasar darurat itu adalah data pedagang yang dicatat di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng. Sesuai data itu sebenarnya jumlah pedagang di los Pasar Banyuasri sekarang ini sekitar 1.000 orang. Namun, dari data potensial yang dihimpun PD Pasar pedagang yang aktif berjualan 560 orang. Sementara, pedagang yang berjualan di kios 56 orang, dan 92 orang menempati rumah toko (ruko-red).

Mengacu data pedagang potensial, pihaknya menuangkan DED pasar darurat itu sudah tuntas disusun, baik ukuran los, kios, dan ruko, Disdagprin juga berpatokan pada ketentuan SNI. Dengan acuan itu, ada perbedaan ukuran antara los, kios, dan ruko. Ukuran los dibangun 2 x 2,5 meter. Sedangkan, kios ukurannya 3 x 3 meter, dan ruko luasnya 3 x 4 meter.

"DED sudah selesai. Rencana awal bulan depan, kami ajukan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng untuk ditenderkan. Acuan yang kami gunakan untuk menyiap-

kan jumlah los, kios, dan ruko berdasarkan data potensi yang ada. Artinya, berpatokan sesuai pedagang yang aktif berjualan saat ini," katanya.

Menunggu proses tender tanggal 6 Februari 2019 mendatang, kata Suparto, pihaknya mensosialisasikan konstruksi dan teknis pembagian tempat berjualan di pasar darurat itu melibatkan semua pedagang. Terkait teknis pembagian dan pengaturan di lapangan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PD Pasar. Ini karena semua kewenangan penempatan pedagang dan posisi yang ideal itu merupakan ranah tanggung jawab PD Pasar Buleleng. "Bersama PD Pasar nanti kami coba bahas teknis pengaturan dan penempatan posisi terutama los dan kios. Kalau ruko sudah pasti kita siapkan di bahu Jalan Samudra, Singaraja. Kami harapkan kalau memang PD Pasar akan mengikuti pola penempatan di pasar yang sekarang bisa saja, namun karena ini pasar darurat kita akan carikan pengaturan terbaik," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menyusul pembangunan tahap pertama revitalisasi Pasar Banyuasri dijalankan awal tahun ini. Dalam revitalisasi pertama ini menelan

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Media:

Kategori: *SAMBUNGAN*

anggaran Rp 100 miliar. Dana revitalisasi itu bersumber dari APBD Buleleng Rp 50 miliar, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Rp 25 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Hotel Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung Rp 25 miliar.

Pembangunan tahap pertama ini sudah dialokasikan anggaran Rp 95 miliar. Pembangunan fisik itu sudah tahap persiapan pengumuman lelang di BLP. Menyusul akan dimulainya pembangunan tahap awal itu, pemerintah menyiapkan pasar darurat untuk

menampung pedagang di Pasar Banyuasri saat ini. Untuk pembangunan pasar darurat, pemerintah mengalokasikan dana lebih dari Rp 1 miliar.

Pasar darurat ini memanfaatkan areal Terminal Banyuasri bergabung dengan pedagang pasar tumpah. Sedangkan ruko dibangun dengan memanfaatkan bahu Jalan Samudra, Singaraja. Relokasi pedagang dijadwalkan paling lambat awal Maret 2019 mendatang. (mud)



Ketut Suparto

Nama Media: *BALI POST*

Kategori: *Lingkungan*

Peternakan Babi di Desa Bila

DLH akan Telusuri Temuan Aliran Limbah Cair

Singaraja (Bali Post) -

Keluhan warga di sekitar kandang peternakan babi milik PT Anugrah Bersama Sukses (ABS) di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan disikapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. Untuk memastikan keluhann gangguan suara bising, bau tidak sedap, dan temuan aliran yang diduga limbah cair di *pangkung* (kali - red) akan dialami. Dalam waktu dekat, pihak DLH akan meninjau langsung ke lokasi peternakan.

Terkait penanganan dugaan gangguan lingkungan itu, DLH akan melakukan tindakan sesuai kewenangan mengacu pada regulasi dan undang-undang.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Buleleng Nyoman Suarjana di ruang kerjanya Senin (28/1) kemarin, mengatakan, keluhan beberapa warga di sekitar kandang ternak babi itu diketahui setelah muncul pemberitaan media masa. Warga merasakan ada gangguan kenyamanan. Seperti sebaran aroma bau tidak sedap mengikuti arah angin. Suara bising dari ternak babi dan gangguan nyamuk dan lalat yang diduga bersumber dari kandang ternak babi milik PT ABS. Temuan terbaru, warga juga menemukan adanya aliran yang diduga mirip limbah cair ke *pangkung* yang berbatasan dengan kandang milik perusahaan.

Mengetahui informasi itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala DLH Buleleng Putu Ariadi Pribadi dan bidang terkait lainnya. Dari koordinasi itu, kendati keluhan warga belum dilaporkan secara formal, DLH berjanji menelusuri situasi yang terjadi di lapangan. Penelusuran ini untuk memastikan kondisi riil. Kemudian, akan ditindaklanjuti dengan pengujian secara ilmiah. Dalam penelusuran ini, DLH tetap berpatokan pada baku mutu lingkungan sesuai Peraturan Gubernur (Per gub) Bali No. 16 Tahun 2016. "Acuan

kami dalam menelusuri keluhan warga di sana adalah baku mutu lingkungan. Soal mencari kepastian apakah keluhan itu masuk pencemaran lingkungan, maka akan dilakukan uji laboratorium. Lab itu ada parameternya apakah suara bising, bau, dan limbah. Kemudian, apakah sudah diolah sesuai Izin Lingkungan yang dilampiri dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup." katanya.

Bisa Cabut Izin Lingkungan

Menurut Suarjana, sejak PT ABS mulai beroperasi sesuai kewenangan, DLH sudah melakukan pemantauan kondisi lingkungan di lokasi. Selama melakukan pemantauan, DLH menyebut kalau kondisi lingkungan di bawah baku mutu lingkungan. Selain itu, DLH juga mengkaji laporan kondisi lingkungan itu wajib dilakukan perusahaan setiap enam bulan sekali. Hanya, laporan situasi lingkungan selama tahun 2018 sudah diterima. Hanya, laporan itu masih dipelajari. Sementara laporan kedua sampai awal tahun ini, belum diterima DLH Buleleng. "Kami akan terus optimalkan pemantauan, kalau hasilnya mengarah pada indikasi gangguan lingkungan, maka kita akan peringati. Kalau terjadi gangguan lingkungan yang dikuatkan kajian ilmiah, maka bisa saja ada pencabutan izin lingkungan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa



Nyoman Suarjana

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

dia:

Kategori:

SAMBUNGAN

warga yang tinggal di sekitar kandang ternak babi milik PT. ABS mengeluh karena terganggu suara bising babi yang dipelihara perusahaan. Kenyamanan warga terganggu karena pada situasi tertentu bau tidak sedap menyebar mengikuti arah angin. Belakangan ini, lalat dan nyamuk diduga berasal dari kandang babi itu. Hal itu dipercaya mengganggu kesehatan warga.

Temuan terbaru warga, ada aliran air yang diduga mirip limbah cair di *pangkung* di sebelah utara kandang di lahan bawah. Di *pangkung* yang biasanya mengalirkan air ketika hujan, namun ketika tidak turun hujan justru muncul aliran air. Warga kemudian memastikan sumber aliran air itu. Warga menemukan air yang diduga limbah cair itu mengalir dari got di sekitar kandang ternak babi.

Sementara Direktur Utama PT. ABS Nyoman Widiana mengatakan, limbah ternak babi yang dihasilkan perternakannya itu diolah dengan sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Limbah itu diolah dengan menampung pada lima lokasi bak penampungan. Limbah yang sudah diolah dan tidak berbahaya itu digunakan untuk menyiram tanaman di lokasi kandang. Di lokasi kandang atas dan di lahan bawah sudah dibuat got yang bermuara di *pangkung*. Hanya, got itu mengalirkan air hujan dan air dari kamar mandi dan tempat mencuci keperluan aktivitas peternakan.

Terkait suara bising dan bau tidak sedap, itu perusahaan sudah melakukan penanganan untuk meminimalisasi gangguan itu. Pihaknya, juga masih menguji kondisi lingkungan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali. (kmb38)

Nama Media: *BALI POST*

Kategori: *PERUSAHAAN DAERAH*

Pemkab "Lebur" PD BPR Buleleng 45 Jadi Perseroda

Singaraja (Bali Post) -

Pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Buleleng 45, belakangan ini belum sesuai harapan. Ini karena manajemen perusahaan yang kurang SDM yang cerdas, sehingga keuntungan dan aset yang dikelola kalah jauh dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Tidak ingin kalah bersaing dengan lembaga keuangan sejenis, Pemkab Buleleng mengusulkan kepada DPRD Buleleng untuk "melebur" BPR yang berkantor di Jalan Pramuka Singaraja itu menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Usulan merombak BPR itu dituangkan pada penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang PT BPR Buleleng 45 (Perseroda). Nota pengantar itu disampaikan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) saat sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng. Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna bersama anggotanya. Usai sidang, DPRD Buleleng langsung membentuk panitia khusus (Pansus) di mana ketuanya ditunjuk anggota Komisi III DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana.

Tirta Adnyana mengatakan, dari segi manaje-



PARIPURNA - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengusulkan merombak PD BPR Buleleng 45 menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Usulan ini dituangkan dalam nota pengantar Ranperda tentang PT BPR Buleleng 45 (Perseroda).

men, laju perusahaan BPR Buleleng 45 itu terkesan jalan di tempat (stagnan). Bahkan, kalau dibandingkan lembaga sekelas LPD, BPR Buleleng 45 itu masih kalah jauh dari segi pengelolaan aset dan raihan keuntungan. Atas kondisi itu, politisi Partai Golkar Buleleng ini menyambut baik kebijakan Bupati merombak BPR Buleleng 45 menjadi perseroda.

"Kalau saya contohkan LPD. Lembaga BPR itu kalah sebab aset dan keuntungan

setahun masih di bawah LPD. Ini terjadi karena manajemen masih perlu dibenahi secara menyeluruh," katanya.

Dewan asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini menambahkan, perusahaan daerah yang orientasinya mengejar keuntungan kelasnya memang harus level perseroan. Karena itu pola manajemen usahanya harus dijalankan secara profesional. Selain itu, diawasi lembaga ahli di bidang keuangan. Se-

mentara unsur pelaksana usahanya merupakan para pemegang saham. Dengan manajemen seperti itu, otomatis direksi digejot mengejar keuntungan. Dengan strategi itu dengan sendirinya aset perusahaan itu akan terus meningkat. Berbeda dengan pengelolaan sekarang. Kebijakan direksi masih dikendalikan pemerintah, sehingga tatanan manajemen masih terpaku pada kebijakan tersebut.

"Lembaga keuangan sekelas

BPR harus mencari untung. Sekarang bagaimana caranya mencari untung itu. Karena kebijakan masih menunggu pemerintah. Kalau sudah menjadi PT, direksinya idealnya dari pihak profesional di bidangnya. Dalam penanaman ekuitas (saham-rod), selain pemerintah bisa dari pihak ketiga. Pengawasannya dilakukan lembaga khusus termasuk diawasi publik," katanya.

Tirta Adnyana mengatakan, selain BPR Buleleng 45, masih ada satu perusahaan daerah lain yang berpeluang dirombak menjadi perseroan. Perusahaan itu adalah PD Suwatantra, yang kini mengelola pertanian dan

perkebunan, serta usaha sewa mobil. Dia menilai manajemen masih perlu digejot. Untuk mencari pengelola profesional di bidangnya, dia menilai perusahaan itu cocok dilebur menjadi perseroan.

"Kedua perusahaan itu beda dengan PDAM dan PD Pasar yang lebih condong kepada pelayanan publik, sehingga keduanya memungkinkan dilebur. Semuanya menjadi perseroan dan secara regulasi yang mengatur diwujudkan perusahaan daerah itu bisa dalam bentuk perseroan," tegasnya. (kmb38)

Media: *MALI POST*

Kategori: *FKPPI*



Bali Post / kmb38

DIKUKUHKAN - *Pengurus Cabang KB FKPPPI 1402 Buleleng masa bakti 2019-2024 dikukuhkan di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja, akhir pekan lalu.*

Jaga Persatuan dan Kesatuan

SEBAGAI putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI/Polri yang lahir dari patriot bangsa, diharapkan selar dengan fungsinya sebagai generasi penerus. Wajib dengan penuh kesadaran melanjutkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. "Ke depan program kerja akan diarahkan mendukung program pemerintah pusat, khususnya Pemkab Buleleng," ujar Ketua Pengurus Cabang KB FKPPPI 1402 Buleleng Sudiarta Wijaya usai prosesi pelantikan sekaligus pengukuhan Pengurus Cabang KB FKPPPI 1402 Buleleng masa bakti 2019-2024 di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja, akhir pekan lalu.

Tampil sebagai Ketua Pengurus Cabang KB FKPPPI 1402 I Putu Gede Sudiarta Wijaya, S.E., Richadus Thy Datu (Sekretaris), dan Vidia Mitra, M.Pd. (Bendahara). Pengukuhan itu ditandai penyerahan bendera organisasi. Hadir pada acara itu, Ketua PD XIV KB FKPPPI Bali Tri Nugraha, S.H., Sekretaris PD KB FKPPPI XIV Bali Didik Supriadi, S.H., Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG. dan Pengurus Cabang KB FKPPPI se-Bali. Menurut, Sudiarta Wijaya, KB FKPPPI Buleleng 1402 memiliki visi, bersama seluruh putra-putri bangsa turut ambil bagian secara aktif mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (mud)

Nama Media: BALI POST

Kategori: PREMANISME

Kalah Judi, Gadaikan Mobil PNS yang Disewa

Pemilik Diancam Bayar Rp 20 Juta

Singaraja (Bali Post) -

Dua penjudi tajen (sabungan ayam -red) diamankan Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja. Pasalnya, keduanya diduga melakukan tindakan penggelapan satu unit mobil dan disertai pengancaman. Diduga aksi ini dilakukan karena kehabisan uang setelah kalah taruhan tajen di Denpasar.

Berdasarkan laporan kepolisian, kedua pelaku judi tajen itu masing-masing Dewa AR (38) asal Kelurahan Banyuning Timur dan Kadek J (37) warga Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng. Keduanya ditangkap setelah korban pemilik mobil Suzuki APV DK 1440 Wayan Sukarsa (44) alamat Kelurahan Banyuning Timur melaporkan mobilnya digadaikan pelaku. Korban yang merupakan PNS itu juga sempat diancam mobilnya tidak akan dikembalikan kalau tidak menyerahkan uang Rp 20 juta.

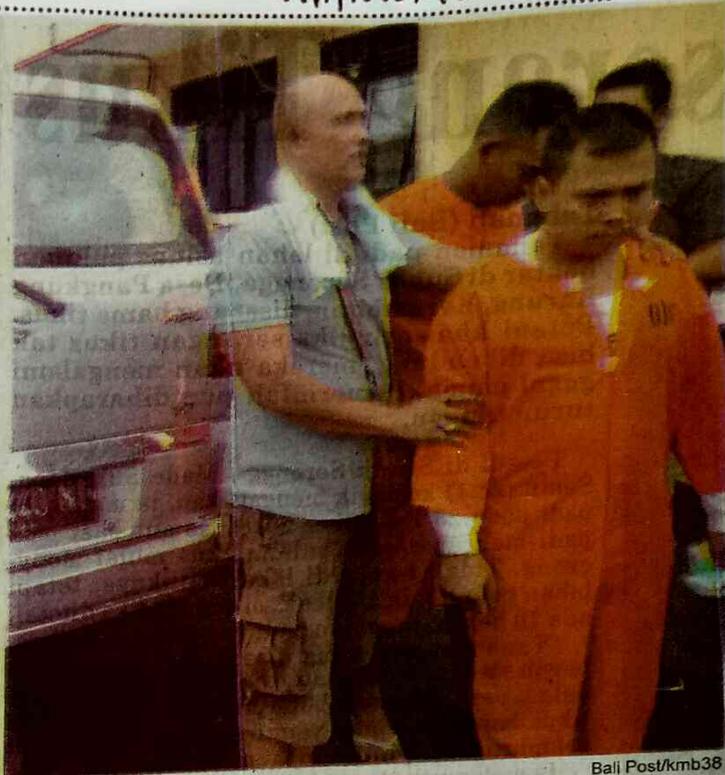
Menariknya, pelaku ini meminta uang kepada korban untuk menebus mobil milik korban yang telah digadaikan kepada seseorang di Kecamatan Banjar. Dari permintaan uang itu, korban menyanggupi memberi Rp 10 juta. Saat menyerahkan uang itu, Unit Reskrim langsung menangkap pelaku di rumah korban, Jumat (25/1), sekitar pukul 16.00 wita. Mobil milik korban itu juga langsung diamankan sebagai barang bukti.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol A.A. Wiranata Kusuma seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.I.K., Senin (28/1) kemarin, mengatakan, kasus ini awalnya penggelapan. Pelaku Dewa AR yang kecanduan berjudi tajen itu menyewa mobil milik korban tanggal 17 Januari 2019. Setelah dua hari menyewa mobil korban, pelaku tidak mengembalikan mobil itu.

Karena masa sewa sudah habis, korban meminta pelaku mengembalikan mobilnya. Dengan santai dikatakan mobil korban itu sudah digadaikan. Menariknya, pelaku malah meminta korban menyerahkan uang Rp 20 juta kalau ingin mobilnya kembali. Pelaku mengancam mobil itu akan tidak kembali selamanya, kalau melapor ke polisi. Karena panik, korban menuruti keinginan pelaku dan menyerahkan uang Rp 10 juta. Sebelum menyerahkan uang, korban melaporkan kejadian itu. Saat akan menyerahkan uang dan pelaku membawa mobil korban, polisi langsung membekuk pelaku tanpa perlawanan berarti. Polisi mengamankan uang Rp 10 juta dan mobil milik korban untuk barang bukti. "Sudah minjam mobil orang dan menggadaikan lalu mau meras dengan mengancam. Aksi ini sudah mengarah pada premanisme. Kasusnya tetap kami proses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Setelah menangkap Dewa AR, polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut. Pelaku menyebut kalau lokasi menggadaikan mobil korban di Kecamatan Banjar dari petunjuk pelaku Kadek J. Pengakuan itu kemudian ditindaklanjuti dan pelaku Kadek J langsung diamankan. Dari interogasi polisi, pelaku lainnya juga ikut mengancam korban. Kalau korban tidak menyerahkan uang, lokasi dan siapa orang yang menggadaikan mobil korban itu tidak akan ditunjukkan. "Pelaku kedua ini juga ikut mengancam. Tujuannya ya untuk mencari untung di mana mobil digadaikan Rp 10 juta namun mengancam korban meminta uang tebusan Rp 20 juta," tegasnya.

Sementara itu, Dewa AR mengakui perbuatannya menggelapkan mobil dan mengancam korban. Menggadaikan mobil korban itu terpaksa dilakukan karena kalah taruhan judi tajen di Denpasar. Uang hasil menggadaikan mobil itu kemudian digunakan kembali berjudi. "Biasa kalau ke arena tajen di luar kota saya sewa mobil dan menjemput dia (Kadek J - red). Karena kalah judi mobil sewaan itu saya gadaikan. Saya sudah bilang mobil itu sudah digadaikan. Untuk menebusnya saya minta membayar Rp 20 juta," katanya. (kmb38)



Bali Post/kmb38

GELAPKAN MOBIL - Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja menangkap dua penjudi tajen yang diduga melakukan penggelapan mobil disertai aksi pemerasan.